



# kiprah

No. 9/Tahun XII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SEP 2026

Editor's  
Choice

Meningkatkan  
Pendapatan Masyarakat

Reses

Ekonomi Warga  
Menjadi Perhatian

Meningkatkan  
Kemandirian Fiskal





# HAOR NAS<sup>2026</sup>

Hari Olahraga Nasional

Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar

# Contents

Sep 2026

Tak Cukup  
Menampung Kebutuhan  
di Tengah Jalan

3

## 14 On The Cover

Meningkatkan  
Kemandirian Fiskal



Reses Menghimpun  
Ragam Aspirasi Warga

16

Memastikan  
Kemampuan Keuangan  
Daerah

19

Belanja Meningkat  
Jadi Rp 2,8 triliun

21

23

Pandangan Fraksi tentang  
RAPBD 2027

Digitalisasi Pendapatan  
Asli Daerah

30

Meningkatkan Pendapatan  
Masyarakat

32

# Mandiri

Raperda APBD 2027 direncanakan pendapatan daerah meningkat sebesar 2,27% atau Rp 62,57 miliar dari Rp 2,75 triliun menjadi Rp 2,81 triliun. Rencana belanja daerah meningkat sebesar 2,23% atau Rp 61,57 miliar, dari Rp 2,75 triliun menjadi Rp 2,81 triliun.

Seperti daerah lain, Kabupaten Sumedang ketergantungan sangat tinggi pada dana transfer mencapai 74,48%. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) 25,62% dari total pendapatan.

Ketergantungan pendapatan dari transfer pusat yang cukup tinggi ini disoroti fraksi-fraksi DPRD. Sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Mereka menyebutkan, fiskal daerah sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pusat dan provinsi. Diperlukan langkah kebijakan strategis agar ketahanan fiskal Sumedang tetap terjaga.

Lalu apa jawaban Bupati Sumedang tentang tingginya ketergantungan fiskal daerah Sumedang atas dana transfer dari pemerintaah pusat. Bagaimana langkah strategi Pemkab Sumedang atas ketergantungan fiskal daerah itu?

Untuk mengurangi ketergantungan tinggi pada dana transfer, pemda akan berusaha meningkatkan kemandirian fiskal melalui penataan ulang sektor pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Bupati juga sependapat bahwa kebijakan strategis dan teknis untuk memperbaiki capaian target saling berkaitan.[\*]

Selamat membaca.

Diterbitkan oleh :

**HUMAS  
DPRD  
Sumedang**

**Alamat Redaksi :**  
Jl. Pangeran Soeriatmadja No. 10  
Sumedang.  
Telp (0261) 201229  
Fax (0261)207335

Pelindung : Ketua DPRD, Sidik Jafar, S.E.  
Penasehat : Wakil Ketua DPRD, Atang Setiawan, S.E., H. Mulya Suryadi, S.Pd.,M.Kom.,  
Ruli Aditya,  
Pengarah : M. Yusuf Sahrulloh, S.STP,M.Si.  
  
Pemimpin Redaksi, Ketua Tim : Yuyun Susiva WN, S.E., M.M.  
Sekretaris : Widi Mujisantoso, S.Sos.  
Redaksi : Yuyun Susiva WN, S.E., M.M. , Atien Nurbaeti, S.Ag., Toufik Setiawan, S.E., Suherman Santika,  
Angga Aris Surya, S.STP, Yanti Hurhayati, S.Sos, Cecep Wachdiana P, Deddi Rustandi, Vera Suciati  
Rilis, Kliping & Relay Radio : Usep Saepudin, S.Ag., M. Iqbal Nugraha, Rachmat Fajar Agung, S.T.  
Desain & Layout : Yanyan Hijriana

# Tak Cukup Menampung Kebutuhan di Tengah Jalan

**R**aperda APBD Perubahan tahun 2026 disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir kepada DPRD Sumedang melalui Rapat Paripurna, Rabu, 9 September 2026.

Perubahan anggaran harus dilakukan karena APBD 2026 ternyata tidak cukup untuk menampung kebutuhan yang muncul di tengah jalan.

Nota pengantar Raperda APBD Perubahan tahun 2026 disampaikan Bupati

Sumedang ke DPRD. Kemudian ditanggapi dalam pandangan umum fraksi-fraksi do DPRD.

Pandangan tujuh fraksi ditanggapi Bupati Sumedang dengan menyampaikan nota jawaban bupati. Pembahasan berikutnya dilakukan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berikut ini, laporan nota pengantar, pandangan tujuh fraksi dan jawaban bupati atas Raperda APBD Perubahan 2026.[\*]

# Sederet Kebutuhan di Penghujung Tahun

Tahun Anggaran 2026 sudah berjalan lebih dari setengahnya, namun ada kebijakan dan kondisi lain yang mengharuskan anggaran diubah agar seluruh target dapat tercapai di akhir tahun nanti. Maka, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2026 disepakati pada akhir Agustus 2026, kini DPRD membahas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2026.

Bupati menjelaskan besaran alokasi dan peruntukan. Sebelumnya, kebijakan dan prioritas anggaran untuk sisa tahun anggaran ini sudah lebih dulu dibahas dalam KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2026. Perubahan anggaran harus dilakukan karena APBD 2026 ternyata tidak cukup untuk menampung kebutuhan yang muncul di tengah jalan, karena adanya kebutuhan alokasi belanja bertambah sebesar Rp 106,47 miliar, sementara pendapatan hanya bertambah Rp60,23 miliar.

"Karena berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi sampai akhir tahun nanti, maka ada kebijakan yang harus diubah sedangkan pemerintah bukan cuma punya uang tambahan, tetapi juga punya kebutuhan belanja baru atau kebutuhan belanja yang membesar," kata Bupati Dony.

Dari perhitungan yang ada, maka didapat jumlah selisih antara anggaran belanja dan pendapatan sebesar Rp. 46,24 miliar. Bupati pun menegaskan bahwa perubahan APBD 2026 bukan semata karena pendapatan bertambah, namun justru kebutuhan belanja tumbuh hampir dua kali lebih besar daripada tambahan pendapatan.

Beberapa kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi adalah iuran jaminan kesehatan masyarakat miskin, subsidi

Bus Rapid Transit (BRT), kekurangan alokasi gaji PPPK paruh waktu, peningkatan pelayanan BLUD, dan pemeliharaan jalan, irigasi dan sungai. Selain itu, ada juga kebutuhan alokasi untuk rumah bagi korban bencana, pengadaan tanah untuk relokasi bencana di Cisurat, dan pembangunan Jembatan Sasak Beureum.

Lebih jauh lagi, yang paling konkret adalah pemerintah baru bisa mengejar beberapa persoalan menjelang akhir tahun. Maka, dalam perubahan APBD 2026, disiapkan sekitar Rp10,2 miliar untuk jalan, Rp983,5 juta untuk irigasi, dan Rp1 miliar untuk PJU.

Sementara, alasan dialokasikannya pengadaan tanah untuk relokasi warga di Cisurat, pembangunan rumah korban bencana, dan pembangunan Jembatan Sasak Beureum adalah karena kebutuhan anggaran ini bukan jenis belanja yang bisa dengan mudah menunggu APBD tahun berikutnya. Sehingga, salah satu alasan faktual perubahan APBD adalah munculnya kebutuhan yang memiliki konsekuensi langsung apabila tidak segera dibiayai. [v]



# Pendapatan Meningkat 2,19%



**S**ecara struktur, unsur pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026 yang direncanakan meningkat sebesar 2,19% atau sebesar Rp.60,23 miliar. Pada APBD 2026 lalu, pendapatannya adalah sebesar Rp. 2,75 triliun dan kini pada APBD Perubahan 2026 menjadi Rp. 2,1 triliun.

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat 0,59% atau sebesar Rp.4,18 miliar dari rencana APBD 2026 sebesar Rp.710,35 miliar menjadi Rp.714,54 miliar.

Rincian PAD yaitu pajak daerah direncanakan menurun 0,62% atau Rp.2,07 miliar dari rencana APBD 2026 yaitu sebesar Rp.333,61 miliar menjadi Rp.331,53 miliar dan retribusi daerah direncanakan meningkat 4,16% atau Rp.4,85 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan meningkat 1,06% atau Rp.159,93 juta.

Terdapat juga lain-lain pendapatan yang sah direncanakan menurun 0,51% atau Rp.1,24 miliar APBD 2026 sebesar Rp.244,76 miliar menjadi

Rp.246,01 miliar.

Selain itu, terdapat pendapatan dari dana transfer yang direncanakan meningkat 2,75% atau sebesar Rp.56,04 miliar dari rencana APBD 2026 sebesar Rp.2,04 triliun menjadi Rp.2,09 triliun. Peningkatan dimaksud sebagian besar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dengan rinciannya yaitu dana transfer pusat direncanakan meningkat 2,88% atau Rp.55,14 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp.1,91 triliun menjadi Rp.1,97 triliun, dan dana transfer antar daerah direncanakan meningkat 0,72% atau Rp.894,94 juta dari APBD

2026 yaitu sebesar Rp.124,63 miliar menjadi Rp.125,52 miliar.

Struktur lainnya dari RAPBD 2026 adalah belanja daerah. Dana ini direncanakan meningkat 3,86% atau Rp.106,47 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp.2,75 triliun menjadi Rp.2,86 triliun. Peningkatan alokasi tersebut diperuntukkan belanja operasi yang anggarannya meningkat 2,80% atau Rp.60,18 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp.2,14 triliun menjadi Rp.2,20 triliun dan untuk belanja modal yang direncanakan meningkat 14,29% atau Rp.29,64 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp.207,52 miliar menjadi Rp.237,17 miliar.

Tambahan belanja juga diperuntukkan pada dana belanja tidak terduga yang direncanakan meningkat 120,25% atau Rp.9,62 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp.8 miliar menjadi Rp.17,62 miliar dan belanja transfer yang direncanakan meningkat 1,77% atau Rp.7,01 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp.396,79 miliar menjadi Rp.403,81 miliar. [\*]

# Ini Daftar Pendanaan Prioritas



Pemkab Sumedang juga harus mengalokasikan sejumlah pendanaan priotas yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin penerima bantuan iuran sebesar Rp. 14,04 miliar, subsidi Bandung Rapid Transit (BRT) sebesar Rp. 1,2 miliar, pemenuhan kekurangan alokasi gaji PPPK paruh waktu.

Sebesar Rp. 8,1 miliar, kekurangan pembayaran iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi kepala desa dan perangkat desa serta para kader posyandu sebesar Rp.1,47 miliar, serta kebutuhan belanja barang dan jasa BLUD untuk peningkatan pelayanan kesehatan sebesar Rp.15,2 miliar.

Pendanaan prioritas lainnya adalah belanja pemeliharaan untuk program Unit Reaksi Cepat (URC) jalan, irigasi dan sungai sebesar Rp.2,9 miliar, pembangunan rumah untuk korban bencana di Cisarua dan Mekarrahayu sebesar Rp.375 juta, pengadaan tanah untuk relokasi bencana di Cisurat dan pengadaan tanah jembatan Sasak Beureum

Rp.1,1 miliar, belanja sarana dan prasarana kesehatan pada BLUD sebesar Rp.5,9 miliar, rehabilitasi gedung pendidikan serta pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 5 miliar, dan belanja infrastruktur jalan sebesar Rp.10,2 miliar, belanja infrastruktur irigasi sebesar Rp.983,51 juta, serta untuk belanja infrastruktur penerangan jalan umum sebesar Rp.1 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah pada R APBD Perubahan Tahun 2026 direncanakan meningkat Rp.86,240 miliar dari rencana APBD 2026 sebesar Rp.10 miliar menjadi Rp.96,24 miliar. Peningkatan dimaksud bersumber dari silpa tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK dan pinjaman jangka pendek pada BLUD.

Adapun untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada raperda perubahan APBD 2026 direncanakan meningkat Rp.40 miliar dari rencana APBD 2026 sebesar Rp.2,5 miliar menjadi Rp.42,50 miliar. Peningkatan tersebut bersumber dari pembayaran pokok pinjaman jangka pendek pada BLUD sebesar Rp.40 miliar. [v]



# Seberapa Besar Anggaran Bermanfaat

**P**ada perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat 2,19 persen menjadi Rp2,81 triliun, sedangkan belanja daerah meningkat 3,86 persen menjadi Rp2,86 triliun. Fraksi PKS menilai penambahan belanja harus didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memiliki manfaat langsung. Belanja tidak terduga yang meningkat 120,25 persen menjadi Rp17,62 miliar juga perlu dijelaskan basis kebutuhan dan risikonya agar tetap akuntabel.

Mengenai silpa dan pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan meningkat Rp86,24 miliar, dari Rp10 miliar menjadi Rp 96,24 miliar, yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK dan pinjaman jangka pendek pada BLUD. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meningkat Rp40 miliar untuk pembayaran pokok pinjaman jangka pendek pada BLUD.

Penggunaan silpa dan pinjaman jangka pendek harus dilihat secara utuh dalam kerangka kesehatan fiskal daerah. Khusus pinjaman BLUD, perlu dipastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk menjaga kualitas pelayanan dan

memiliki kemampuan pengembalian yang jelas.

Sementara, dari seluruh proses pembahasan, Fraksi PKS berharap pembahasan tidak sekadar menyelesaikan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menghasilkan APBD yang sehat, kredibel, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Bagi fraksi, ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, melainkan seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, memperbaiki pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan. Fraksi memandang bahwa pembahasan RAPBD tidak semata-mata berbicara tentang angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Implementasi perencanaan dan penganggaran program pembangunan membutuhkan tatakelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud dengan kepemimpinan yang memiliki integritas, akuntabilitas, dan keteladanan sehingga melahirkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.[v]



# Kejelasan Tentang BTT

**F**raksi Partai Gerinda memohon klarifikasi atas data lain-lain pendapatan yang sah sehingga ada narasi menyebutkan menurun sebesar Rp1,24 miliar. Namun nominal angka rencana justru naik dari Rp 244,76 miliar menjadi Rp 246,01 miliar.

Selain itu, terdapat kenaikan Belanja Tidak Terduga yang sangat drastis sebesar 120,25% atau sekitar Rp. 9,62 miliar, yaitu dari Rp 8 miliar menjadi Rp 17,62 miliar. Kebutuhan mendesak atau potensi bencana spesifik apa yang menjadi dasar pemikiran alokasi penambahan anggaran btt sebesar ini di akhir tahun anggaran.

Terkait realisasi silpa tahun 2025 hasil audit BPK, berapa jumlah pasti silpa tahun 2025 riil berdasarkan LHP BPK yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan perubahan APBD 2026?

Perubahan APBD diawali dengan perubahan KUA PPAS dan perubahan RKPD yang didasari dari hasil evaluasi semester

pertama pelaksanaan APBD berkenaan. Proses evaluasi semester pertama yang dilakukan komisi DPRD terhadap mitra kerjanya, sehingga diperoleh hasil dari sisi pendapatan daerah dimungkinkan akan terjadi ketidaktercapaian pendapatan dari target yang telah ditetapkan terutama penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan, tingkat realisasi belanja juga masih sangat rendah sampai dengan akhir semester pertama tahun 2026. Hal ini sebagai dampak dari ketidaktercapaian penerimaan daerah ini yang berpengaruh terhadap rencana belanja dan pembiayaan.

Terhadap kondisi yang seperti ini, maka perubahan APBD 2026 menjadi sebuah keniscayaan, apalagi kalau merujuk pada PP 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang dijelaskan lebih lanjut dengan Permendagri 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dapat tersusun dengan baik meski dengan berbagai keterbatasan.[v]



# Menyempitkan Ruang Fiskal

**P**erubahan APBD Tahun 2026 bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan upaya menyelaraskan rencana dengan kenyataan di lapangan sepanjang tahun berjalan.

Fraksi Golkar mengapresiasi adanya penyesuaian target pendapatan mencerminkan realitas penerimaan yang lebih akurat serta telah dilakukannya optimalisasi potensi PAD terus diupayakan pada berbagai pos penerimaan. Selain itu, telah dilakukan juga pemanfaatan SiLPA dialokasikan untuk kegiatan prioritas dan penutup kekurangan belanja.

Adanya penyesuaian turun pada beberapa pos pendapatan menunjukkan penetapan target awal belum sepenuhnya didasarkan data akurat. Beberapa komponen PAD belum mencapai target karena basis data belum lengkap, dan tingkat kepatuhan masih rendah, serta pengawasan belum maksimal. Mohon penjelasan kebijakan strategis dan teknis yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian target tersebut.

Fraksi Golkar juga menilai masih tingginya ketergantungan pada dana transfer membuat perubahan anggaran sangat rentan

terhadap keterlambatan alokasi dari atas.

Selain itu, banyak pos pendapatan yang penggunaannya sudah terikat aturan, menyempitkan ruang alokasi sesuai prioritas lokal. Sebuah resiko dari skema kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah terutama di transfer DAU yang earmarked. Harus ada penjelasan terkait upaya sinkronisasi program dan kegiatan yang earmarked tersebut agar bisa on the track sesuai capaian target RKPD.

Pada unsur belanja, perubahan APBD memungkinkan pengalihan anggaran ke kegiatan yang lebih mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat namun alokasi tetap diprioritaskan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja mengikat, dan pelayanan dasar serta menampung kebutuhan yang muncul di tengah tahun, baik penanganan perubahan ekonomi maupun situasi darurat.

Penyerapan anggaran di beberapa perangkat daerah belum optimal maka perlu dilakukan evaluasi mendalam dan percepat pelaksanaan. Selain itu, beban belanja wajib seperti iuran jaminan kesehatan, tunjangan ASN, dan kewajiban lain terus menekan ruang fiskal pembangunan. [v]



# Cepat Tanggap Pemkab

**F**raksi PAN memberikan perhatian khusus pada pergeseran anggaran di sisa tahun anggaran 2026 agar tetap realistis, akuntabel, dan berpihak pada kedaruratan masyarakat.

Apresiasi terhadap kebencanaan yang telah mengalokasikan anggaran cepat tanggap terhadap kemanusiaan, seperti pembangunan rumah korban bencana di Cisarua dan Mekarrahayu sebesar Rp.375 juta serta pengadaan tanah relokasi bencana di Cisurat sebesar Rp1,1 miliar.

Begitu juga dengan adanya keberpihakan jaminan sosial yang menyambut baik langkah pemda dalam pemenuhan kekurangan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin penerima bantuan iuran sebesar Rp14,04 miliar serta untuk perbaikan infrastruktur jalan dan penambahan anggaran untuk pemeliharaan program jalan, irigasi, dan sungai sebesar Rp2,9 miliar.

Penurunan target pendapatan pajak daerah di tahun berjalan pajak daerah yang direncanakan menurun sebesar 0,62%. Hal ini sangat menyedihkan sekali di saat daerah membutuhkan kemandirian fiskal, namun pos pajak daerah pada APBD 2026 justru diproyeksikan

menurun sebesar 0,62% atau berkurang Rp2,07 miliar.

Fraksi PAN meminta penjelasan objektif serta mempertanyakan sektor pajak mana saja yang mengalami kelesuan dan gagal mencapai target. Lantas dari kondisi tersebut, apa langkah darurat yang disiapkan pemda untuk mengompensasi hilangnya potensi pendapatan miliaran rupiah ini di sisa bulan tahun anggaran 2026 ini.

Evaluasi transparansi atas alokasi Bus Rapid Tess sebesar Rp1,2 miliar, fraksi mempertanyakan perhitungan atas seberapa besar tingkat keterisian penumpang moda transportasi ini. Fraksi juga memastikan bahwa integrasi BRT dengan angkutan lokal Sumedang tidak akan memicu gesekan sosial dengan para sopir angkot.

Hal lain adalah tentang akurasi asumsi belanja modal akhir tahun. Disebutkan bahwa APBD Perubahan 2026, belanja modal dinaikkan signifikan sebesar 14,29% menjadi Rp 237,17 miliar lebih. Namun, mengingat waktu efektif pengerjaan tersisa kurang dari 3 bulan, harus ada strategi pemda untuk memitigasi risiko gagal bayar atau proyek fisik yang mangkrak. [v]



# Masih Kurang Kreatif

**F**raksi PKB melihat Pemkab Sumedang harus tetap fokus terhadap sisa waktu dengan hasil maksimal terutama masih banyaknya infrastruktur jalan dan lainnya harus cepat terealisasi. Sehingga postur anggaran pada perubahan APBD 2026 dapat sesuai dengan nota keuangan bupati terutama fokus kepada belanja kesejahteraan masyarakat dan penguatan infrastruktur.

Meski dengan melihat kinerja keuangan perubahan APBD Tahun 2026 diproyeksikan hanya ada sedikit kenaikan pendapatan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Namun, patut diapresiasi ketika banyak pemkab lainnya sedang mengalami kesulitan keuangan daerah.

Dengan memperhatikan dokumen rencana pendapatan dalam perubahan APBD 2026, pemkab memproyeksikan PAD dan dana transfer sebesar Rp.2,81 triliun. Proyeksi ini telah mengalami sebesar 2,19% dari dokumen awal atau nota keuangan KUA PPAS yang semula diproyeksikan Rp.2,75 triliun.

Adanya peningkatan pendapatan yaitu sekitar Rp. 60 miliar ini, didominasi oleh proyeksi pendapatan transfer pusat sebesar Rp.56 miliar dan PAD sekitar Rp. 4 miliar.

Fraksi PKB melihat alokasi anggaran yang cukup realistis meski masih kurang kreatif dari sisi pendapatan PAD. Sedangkan, dari sisi belanja, terdapat kesan cukup ambisius karena ada peningkatan belanja di beberapa sektor dengan akumulasi sebesar Rp. 106,47 miliar. Sehingga postur belanja yang sebesar Rp 2,86 triliun, terdapat peningkatan sebanyak 3,86% di banding proyeksi awal sebesar Rp. 2,75 triliun. Dari sisi ini, kerja keras bupati dan tim TAPD dalam melakukan lobi ke pemerintah pusat cukup berhasil.

Dari rencana peningkatan belanja yang sebesar Rp. 106,47 miliar, ternyata hanya terdapat Rp. 11 miliar saja yang dialokasikan untuk belanja infrastruktur. Alokasi sejumlah ini, menurut Fraksi PKB, kurang signifikan dan kurang tepat jika digunakan untuk menjawab banyaknya keluhan masyarakat akan kebutuhan infrastruktur. [v]



# Jadi Bahan Evaluasi Strategi

**F**raksi PDIP mencermati bahwa pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar Rp. 60,23 miliar atau 2,19%, terutama didorong oleh naiknya PAD sebesar Rp. 4,18 miliar. Namun, tercapat beberapa hal krusial diantaranya penurunan pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 2,07 miliar dari target pendapatan transfer pada tahun anggaran 2026 yaitu sebesar sebesar Rp. 331,53 miliar.

Penurunan tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sektor-sektor pajak yang mengalami penurunan, termasuk mengidentifikasi secara jelas faktor penyebabnya serta langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kembali penerimaan pajak daerah.

Berkaitan dengan peningkatan belanja daerah sebesar 3,86% yaitu sebesar Rp. 106,47 milyar pada perubahan APBD 2026 ,

terdapat catatan strategis dengan belanja daerah pada perubahan APBD 2026 yang mengalami peningkatan sebesar 3,86% atau sekitar Rp106,47 miliar. Peningkatan anggaran tersebut harus mendapatkan perhatian dan penjelasan yang lebih serius dari pemerintah daerah.

Kenaikan belanja daerah bukan semata-mata persoalan bertambahnya angka dalam struktur APBD. Setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi manfaat, urgensi, sasaran, serta hasilnya bagi masyarakat.

Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara terbuka dan terukur tentang peruntukkan tambahan anggaran yang dialokasikan, dan siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa target hasilnya dan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Sumedang Tahun 2024–2029.

Mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada orientasi mengejar penghargaan, piagam, predikat, maupun berbagai bentuk pengakuan administratif semata, sementara implementasi program di lapangan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. [v]



# Belum Kuat Bangun Kemandirian

Pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 60,23 miliar atau 2,19 persen, menjadi sekitar Rp 2,81 triliun. Peningkatan masih lebih banyak ditopang oleh pendapatan transfer. Sementara PAD hanya meningkat 0,59 persen dan target pajak daerah justru mengalami penurunan.

Pemerintah daerah sendiri mengakui masih terdapat persoalan dalam optimalisasi PAD, seperti database pendapatan, pengawasan, penegakan terhadap wajib pajak, pemanfaatan aset daerah, serta kontribusi BUMD yang belum optimal. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius tidak hanya besar dalam mengelola anggaran.

Fraksi PPP mengapresiasi peningkatan belanja modal serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya jaminan kesehatan masyarakat miskin, pelayanan kesehatan melalui BLUD, pemeliharaan jalan dan irigasi, penanganan korban bencana, rehabilitasi pendidikan, infrastruktur jalan, irigasi, dan penerangan jalan umum.

Belanja barang dan jasa meningkat cukup signifikan, sementara belanja tidak terduga meningkat 120,25 persen menjadi Rp17,62 miliar. Kebutuhan pelayanan publik, keadaan mendesak, dan penanganan bencana membutuhkan fleksibilitas anggaran. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut harus tetap

disertai dengan transparansi, akuntabilitas, serta ukuran keberhasilan yang jelas.

Mencermati peningkatan penerimaan pembiayaan menjadi Rp 96,24 miliar, yang di antaranya berasal dari silpa Rp 56,24 miliar dan pinjaman jangka pendek BLUD Rp 40 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 40 miliar. Fraksi memahami kebutuhan tersebut sebagai bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah. Namun, prinsip kehati-hatian tetap harus menjadi landasan agar pembiayaan hari ini tidak menjadi beban bagi kemampuan fiskal daerah di masa mendatang.

Berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 60,23 miliar tetapi sekitar Rp 56,04 miliar berasal dari dana transfer. Maka, strategi konkret pemerintah daerah apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Sumedang, khususnya setelah target pajak daerah justru mengalami penurunan.

Dengan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 yang relatif terbatas, bagaimana pemerintah daerah menjamin bahwa tambahan anggaran dalam perubahan APBD ini dapat direalisasikan secara optimal, tepat waktu, tepat sasaran dan tidak justru meningkatkan risiko rendahnya kualitas pekerjaan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan. [v]

# Meningkatkan Kemandirian Fiskal

**N**ota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Rancangan Perubahan RAPBD 2026 disampaikan Bupati Sumedang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 10 September 2026.

Menanggapi pertanyaan soal langkah darurat untuk mengompensasi hilangnya potensi pendapatan, Bupati Sumedang menyatakan sependapat bahwa untuk jenis pajak yang sampai evaluasi tahun berjalan belum mencapai target diperlukan langkah yang lebih terukur dengan melihat kondisi riil masing-masing objek dan subjek pajak.

Terkait moda transportasi Bus Rapid Transportation (BRT), bupati menjelaskan bahwa perhitungan tingkat keterisian penumpang atau load factor secara komprehensif telah dikaji oleh konsultan yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hasil kajian menunjukkan tingkat keterisian penumpang menuju Jatinangor termasuk tinggi sebagai dampak aktivitas kampus di wilayah tersebut.

Untuk integrasi BRT dengan angkutan lokal Sumedang agar tidak memicu gesekan sosial dengan sopir angkot, pemda menyebut koordinasi terus dilakukan bersama pihak pengelola BRT dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengingat angkutan umum rute 04 merupakan angkutan antar kota yang menuju Sumedang ke Jatinangor.

Menjawab pertanyaan soal mitigasi risiko gagal bayar dan risiko proyek mangkrak, pemda menegaskan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan kemampuan fiskal sampai akhir tahun

2026. Akselerasi pengadaan barang dan jasa juga telah mempertimbangkan ketentuan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemda juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menjadikan perubahan target sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan agar lebih presisi dan data lebih akurat.

Sementara, untuk mengurangi ketergantungan tinggi pada dana transfer, pemda akan berusaha meningkatkan kemandirian fiskal melalui penataan ulang sektor pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Bupati juga sependapat bahwa kebijakan strategis dan teknis untuk memperbaiki capaian target saling berkaitan.

Terkait program dan kegiatan yang bersifat earmarked, pemda memahami bahwa pendapatan tersebut membatasi fleksibilitas penggunaannya, sehingga sejak tahap perencanaan harus diselaraskan dengan RKPD dan target pembangunan daerah.

Untuk penyerapan anggaran di beberapa perangkat daerah yang belum optimal, pemda menyebut telah dilakukan evaluasi pada saat penyusunan perubahan anggaran berdasarkan realisasi belanja dan kinerja SKPD pada semester satu.

Belanja wajib seperti iuran jaminan kesehatan, tunjangan ASN, dan kewajiban lain harus dijadikan prioritas utama sebelum membiayai belanja lainnya, meskipun belanja tersebut terus menekan ruang fiskal pembangunan. [v]

# Peningkatan PAD Sebagai Agenda Strategis



**M**enjawab soal strategi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Sumedang menyebut peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan retribusi. Strategi yang ditempuh mencakup optimalisasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran database, optimalisasi aset daerah, peningkatan kontribusi BUMD serta digitalisasi pemungutan.

Sementara untuk realisasi belanja modal, pemda menjelaskan masih ada beberapa pengadaan yang masih dalam proses sehingga belum terlihat realisasi keuangannya, namun pimpinan perangkat daerah terus diingatkan untuk percepatan realisasi.

Terkait upaya meningkatkan kemandirian fiskal, pemda akan menjadikan

peningkatan PAD sebagai agenda strategis melalui perbaikan database, intensifikasi pajak, pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset dan peningkatan kinerja BUMD. Pemda juga sepakat bahwa perbaikan harus menghasilkan perubahan yang dapat diukur agar persoalan tidak kembali menjadi catatan di APBD tahun berikutnya.

Untuk kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp83,74 miliar lebih, sebagian besar bersumber dari kekurangan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu beserta kekurangan iuran asuransi kesehatannya, kekurangan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin penerima bantuan iuran, kepala desa dan perangkat desa serta iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kader posyandu.

Kenaikan belanja tidak terduga sebesar 120,15 persen dijelaskan bersumber dari pengembalian dari sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya yang berasal dari dana spesifik yang telah ditetapkan penggunaannya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025 sebesar Rp56,24 miliar lebih dengan rincian SiLPA earmarked 62 persen atau sebesar Rp34,87 miliar lebih dan SiLPA non-earmarked 38 persen atau sebesar Rp21,36 miliar lebih.

Ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 tidak cukup dilihat dari besarnya tambahan belanja dan tingkat serapan anggaran, tetapi dari keterhubungannya dengan sasaran pembangunan daerah.[v]

# Reses Menghimpun Ragam Aspirasi Warga

Salah satu ruang bertemu antara anggota DPRD Sumedang dan konstituennya adalah melalui reses di masing-masing daerah pemilihan. Melalui reses, terhimpun aspirasi yang merupakan kebutuhan warga. Aspirasi tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial hingga pemberdayaan masyarakat.

Semua aspirasi yang berjumlah sekitar 300 usulan disampiskan dalam Laporan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dan dibacakan pada Rapat Paripurna, Senin, 31 Agustus 2026.

Dari laporan tersebut, aspirasi tersebut dihimpun dari sejumlah daerah pemilihan. Persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu kebutuhan yang banyak disampaikan masyarakat. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), irigasi, hingga penyediaan air bersih.

Di Dapil 1, misalnya, warga mengusulkan perbaikan sejumlah jalan lingkungan di wilayah Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Aspirasi lainnya berupa perbaikan PJU, pengerukan irigasi Sarongge di Kelurahan Pasanggrahan Baru, perbaikan saluran irigasi di Ojolali serta pemeliharaan gedung kesenian di Cipameungpeuk.

Persoalan akses dasar juga terlihat dari usulan warga untuk mendapatkan fasilitas MCK dan air bersih di Dusun Joglo, Desa Mekarjaya.

Sementara di beberapa wilayah lainnya, masyarakat meminta perbaikan jalan lingkungan, jalan desa hingga akses menuju permukiman.

Kebutuhan dan aspirasi warga juga mulai bergeser ke layanan dasar. Selain infrastruktur, aspirasi masyarakat memperlihatkan perhatian yang cukup besar terhadap kualitas layanan dasar. Seperti bidang pendidikan, warga mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran untuk berbagai lembaga pendidikan. Usulan tersebut mencakup PAUD, madrasah, TPA hingga sekolah dasar.

Di Dapil 6, terdapat usulan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah dasar, termasuk SDN Manggung 2 di Kutamandiri serta sekolah dasar di wilayah Sukasari. Ada pula permintaan pembangunan TPT di lingkungan SDN Manggung 2. Kebutuhan pendidikan juga muncul di Dapil 1 melalui usulan pengadaan fasilitas pembelajaran untuk sejumlah madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan di Sumedang Utara.

Sementara pada sektor kesehatan, masyarakat menyoroti kebutuhan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, terutama bagi kelompok rentan.

Di Kecamatan Tanjungmedar, warga mengusulkan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi lansia dan masyarakat yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan. Mereka juga meminta penguatan kegiatan posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan berkala serta dukungan bagi kelompok lanjut usia. [v]

# Ekonomi Warga Menjadi Perhatian

**A**spirasi yang muncul dalam reses juga menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap penguatan ekonomi lokal. Di sejumlah wilayah, warga meminta program pemberdayaan UMKM, tambahan modal, pelatihan keterampilan hingga dukungan pemasaran produk. Di Dapil 3, misalnya, terdapat usulan peningkatan UMKM di Kecamatan Jatinunggal melalui dana bergulir, serta kebutuhan permodalan bagi pelaku UMKM di wilayah Tomo.

Di Kecamatan Tanjungmedar, aspirasi ekonomi juga diarahkan kepada usaha rumahan dan UMKM milik masyarakat, terutama melalui pelatihan keterampilan, bantuan peralatan usaha, pengembangan produk dan pemasaran.

Hal serupa terlihat di wilayah Dapil 5. Masyarakat mengusulkan peningkatan program pemberdayaan UMKM sekaligus tambahan modal bagi pelaku usaha di Desa Cintamulya.

Selanjutnya, aspirasi lainnya adalah bidang pertanian, lingkungan dan perlindungan sosial. Di Dapil 4, misalnya, terdapat sejumlah usulan yang berkaitan dengan jalan usaha tani, irigasi, air bersih dan penerangan. Warga Kecamatan Cibugel mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, sementara masyarakat juga meminta pipanisasi air bersih dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Di Dapil 6, kebutuhan sektor pertanian terlihat dari usulan perbaikan jaringan irigasi di Desa Raharja serta sejumlah ruas jalan yang menunjang aktivitas masyarakat.

Sementara itu, isu lingkungan mulai muncul dalam bentuk kebutuhan tempat pengolahan sampah. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat di Desa Cintamulya dan Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor.

Untuk perlindungan sosial, masyarakat Dapil 5 mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan merata. Perhatian khusus juga diminta bagi penyandang disabilitas, lansia serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

Namun, tidak semua aspirasi berkaitan dengan bantuan pembangunan fisik. Sejumlah warga juga membawa persoalan tata kelola pemerintahan dan kebutuhan kelembagaan desa.

Salah satu aspirasi yang cukup menonjol berasal dari Kecamatan Tanjungsari, yakni usulan pemekaran Desa Cinanjung menjadi Desa Cinanjung dan Desa Pananjung. Aspirasi tersebut disebut telah menjadi komitmen warga sejak 2019 dan diharapkan dapat direalisasikan pada 2027. Di wilayah yang sama, warga juga mengusulkan peningkatan insentif bagi kader Posyandu serta bantuan PTSL untuk sejumlah desa di Kecamatan Sukasari, Tanjungsari, Pamulihan

dan Rancakalong.

Aspirasi lain menyangkut keterbatasan anggaran desa. Masyarakat mengusulkan agar pemerintah menghadirkan program pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sekaligus membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta melalui CSR dan investasi.

Ketua DPRD Sumedang, Sidik Jafar mengatakan, ragam usulan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat Sumedang cukup berlapis. Infrastruktur dasar memang masih menjadi pekerjaan penting, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga membutuhkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi, perlindungan sosial, pengelolaan

lingkungan hingga kepastian dalam tata kelola pemerintahan.

"Reses tidak berhenti pada kegiatan menyerap aspirasi, melainkan tantangan berikutnya adalah bagaimana berbagai usulan tersebut dipilah berdasarkan kewenangan, tingkat kebutuhan dan kemampuan anggaran, kemudian diterjemahkan menjadi program pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Sidik.

Sidik menambahkan, aspirasi yang muncul dari lingkungan warga, dusun hingga desa tidak berhenti sebagai daftar permintaan, tetapi menjadi bahan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.[v]





# Memastikan Kemampuan Keuangan Daerah

**R**ancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 tumbuh positif karena adanya kenaikan pendapatan sebesar 2,27 persen. Namun di sisi lain, prediksi anggaran belanja pun meningkat sebanyak 2,23

persen.

Berikut Nota Pengantar Raperda RAPBD Tahun 2027 yang disampaikan Bupati Sumedang, pandangan fraksi dan jawaban bupati atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD.[\*]

# Pendapatan Bertambah Prioritas Bertumpuk

Ruang fiskal Kabupaten Sumedang pada 2027 bertambah, tetapi tidak serta-merta menjadi lebih longgar. Pendapatan daerah direncanakan naik, namun di saat yang sama kebutuhan belanja juga bergerak hampir sama. Di antara tambahan pendapatan dan daftar kebutuhan yang sebelumnya sudah tergambar serta sudah disepakati dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2027, kini saatnya DPRD Sumedang membahas lebih detail setiap angka dan rupiah yang disampaikan dalam Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2027 melalui Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Rabu, 9 September 2026.

Sekilas, RAPBD 2027 terlihat tumbuh positif karena adanya kenaikan pendapatan sebesar 2,27 persen, namun di sisi lain, prediksi anggaran belanja pun meningkat sebanyak 2,23 persen. Dalam penjelasannya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa di balik persentase yang tampak sehat itu tersimpan ruang fiskal yang sesungguhnya tidak terlalu lebar. Tambahan pendapatan Rp 62,57 miliar hampir seluruhnya beriringan dengan tambahan belanja Rp61,57 miliar. Dengan kata lain, tantangan Sumedang pada 2027 bukan semata mencari lebih banyak uang, melainkan membuat uang yang terbatas itu bekerja lebih keras.

Penambahan belanja di tahun 2027 bukanlah tanpa perhitungan, melainkan karena Pemkab Sumedang harus mempertahankan biaya pelayanan publik. Diakui, belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dan naik menjadi sekitar Rp2,16 triliun. Di dalamnya terdapat kebutuhan yang sulit dihindari, terutama gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan guru sebesar Rp1,2 triliun. Terdapat juga peruntukan gaji PPPK paruh waktu sebesar Rp62,5 miliar.

Alokasi lainnya yang cukup menyita kapasitas fiskal di tahun 2027 adalah anggaran jaminan kesehatan, kecelakaan dan

kematian bagi masyarakat miskin, perangkat desa, dan pekerja rentan sebesar Rp81,12 miliar. Terdapat juga belanja pelayanan BLUD sebesar Rp346,85 miliar dan bantuan operasional satuan pendidikan sebesar Rp117 miliar.

"Yang terpenting dan kami fokuskan pada RAPBD 2027 adalah bahwa anggaran dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan publik demi pengaturan masyarakat yang baik," kata Bupati Dony. [v]



# Belanja Meningkatkan Menjadi Rp 2,8 Triliun



**B**elanja daerah pada Raperda APBD 2027 direncanakan meningkat 2,23% atau Rp.61,57 miliar lebih dari APBD 2026 sebesar Rp.2,75 triliun menjadi Rp.2,81 triliun.

Belanja operasi direncanakan meningkat 1,06% atau sebesar Rp.22,66 miliar dari rencana APBD 2026 yang sebesar Rp.2,14 triliun dan kini menjadi Rp.2,16. Begitu juga belanja modal direncanakan meningkat 13,71% atau Rp.28,45 miliar dari rencana pada APBD 2026 sebesar Rp.207,52 miliar menjadi Rp.235,98 miliar.

Selain itu, kebutuhan lainnya adalah belanja tidak terduga yang direncanakan meningkat 33,96% atau sebesar Rp.2,71 miliar dari rencana APBD 2026 sebesar Rp.8 miliar menjadi Rp.10,71 miliar serta belanja transfer yang direncanakan meningkat 1,95% atau Rp.7,73 miliar dari rencana APBD 2026 yaitu Rp.396,79 miliar, sehingga kini anggarannya menjadi Rp.404,53 miliar.

Selain daftar kebutuhan tersebut, sejumlah pendanaan prioritas juga telah mendesak untuk dibiayai APBD 2027. Yaitu, gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan guru sebesar Rp.1,2 triliun, belanja iuran jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian untuk masyarakat miskin serta kepala desa,

perangkat desa dan pekerja rentan sebesar Rp.81,12 miliar, belanja gaji PPPK paruh waktu sebesar Rp.62,5 miliar, insentif tenaga pendidikan sebesar Rp.9,97 miliar, pembayaran listrik penerangan jalan umum sebesar Rp.7,7 miliar, dan subsidi bunga untuk UMKM sebesar Rp.1,2 miliar dan belanja pelayanan pada BLUD Rp.346,85 miliar.

Terdapat juga belanja bantuan operasional satuan pendidikan sebesar Rp.117 miliar, bantuan permakanan rantang simpati sebesar Rp.5,6 miliar, pembangunan rumah dampak bencana di Sukapura dan Cisurat sebesar Rp.1,87 miliar, belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jembatan sebesar Rp.12,3 miliar, pembangunan rumah tidak layak huni sebesar Rp.1 miliar, Unit Reaksi Cepat Persampahan sebesar Rp.3,8 miliar, dan pembebasan tanah untuk Pusat Pemerintahan sebesar Rp.25 miliar. [v]

## NOTA PENGANTAR

# Jalan Masih Panjang

Pendanaan prioritas masih panjang untuk tahun 2027 nanti. Yaitu, rehabilitasi ruang kelas sekolah sebesar Rp.25,2 miliar, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp.9 miliar, pembangunan dan rehabilitasi gedung kesehatan sebesar Rp.9,6 miliar, infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.87,03 miliar, dan peralatan kesehatan pada BLUD sebesar Rp.20 miliar serta infrastruktur penerangan jalan umum sebesar Rp.7,6 miliar. Terdapat kebutuhan untuk pembangunan rumah potong hewan sebesar Rp.4,9 miliar.

Raperda APBD 2027 telah mencatat bahwa pendapatan daerah direncanakan meningkat sebesar 2,27% atau Rp.62,57 miliar. APBD 2026 mempunyai pendapatan daerah sebesar Rp.2,75 triliun, dan kini akan berubah angkanya menjadi Rp.2,81 triliun pada tahun depan.

Pendapatan asli daerah (PAD) pada Raperda APBD 2027 direncanakan meningkat 1,48% atau Rp.10,49 miliar. Rinciannya adalah pajak daerah direncanakan meningkat 1,33% atau sebesar Rp.4,43 APBD 2026 sebesar Rp.333,61 miliar menjadi Rp.338,04 miliar dan retribusi daerah direncanakan meningkat 5,56% atau Rp.6,49 miliar dari rencana APBD 2026 yang sebesar Rp.116,85 miliar menjadi Rp.123,35 miliar.

Begitu juga hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan direncanakan meningkat 8,08% atau sebesar Rp.1,22 miliar dari rencana APBD 2026 yang sebesar Rp.15,11 miliar menjadi Rp.16,34 miliar serta lain-lain PAD yang sah direncanakan menurun 0,68% atau Rp.1,65 miliar dari rencana APBD 2026 sebesar Rp.244,76 miliar menjadi Rp.243,11 miliar.

Untuk dana transfer pada Raperda APBD 2027 direncanakan meningkat 2,55% atau sebesar Rp.52,08 miliar rencana APBD 2026 menjadi Rp.2,09 triliun lebih. Rinciannya adalah dana transfer pusat direncanakan meningkat 2,49% atau Rp.47,71 miliar dan dana transfer antar daerah direncanakan meningkat 3,50% atau sebesar Rp.4,36 miliar.

Pembentuk RAPBD 2027 adalah pembiayaan daerah yang direncanakan berkurang 13,33% atau sebesar Rp.1 miliar dari rencana APBD 2026 sebesar Rp.7,5 miliar menjadi Rp.6,5 miliar. Uraianannya adalah penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sesuai dengan rencana pada APBD 2026 yaitu sebesar Rp.10 miliar dan pengeluaran pembiayaan pada Raperda APBD 2027 direncanakan meningkat 40% yaitu Rp.1 miliar dari rencana APBD 2026 sebesar Rp.2,5 miliar menjadi sebesar Rp.3,5 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD. [v]



# Intensifikasi Pelayanan Publik

**R**APBD 2027 memproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp2.8 triliun lebih. Proyeksi ini telah meningkat sebesar Rp62,58 miliar dibandingkan APBD induk untuk tahun 2026. Peningkatan ini bersumber dari PAD sebesar Rp720,85 miliar atau naik 1,48% dan telah menyumbang 25,62% dari total pendapatan, dan dari pendapatan transfer sebesar Rp2.092,38 miliar atau naik sebesar 2,55% dan telah menyumbang 74,37% dari total pendapatan serta dari peningkatan terbesar pada dana bagi hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 84,95% yang telah memberikan sinyal positif pemerataan manfaat SDA bagi daerah penghasil.

Proyeksi pendapatan dinilai cukup realistis dan tidak berlebihan serta retribusi daerah naik 5,56% dengan pertumbuhan tertinggi di komponen PAD yang menunjukkan upaya intensifikasi layanan publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik 8,08%, dan telah menandakan kinerja sebagian BUMD mulai membaik.

Ada pos Lain-lain PAD yang Sah yang diproyeksikan turun 0,68%, terutama pendapatan BLUD dan pemanfaatan aset daerah yang perlu dijelaskan secara mendalam

adalah penurunan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat.

Belanja daerah, disebutkan belanja modal direncanakan meningkat dan telah menunjukkan komitmen pembangunan infrastruktur jangka Panjang. Serta adanya upaya pengendalian belanja pegawai sejalan dengan batas maksimal 30% sesuai amanat UU HKPD dan telah dialokasikannya pendanaan pada urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Usulan untuk RAPBD 2027 yaitu segera pemutakhiran data basis objek dan subjek pajak serta retribusi, terapkan digitalisasi pemungutan secara menyeluruh. Segera susun peta jalan diversifikasi pendapatan agar dalam 3–5 tahun porsi PAD meningkat secara signifikan serta terapkan sanksi tegas dan tertulis terhadap penunggak pajak/retribusi, berikan insentif bagi wajib pajak yang patuh.

Segera susun rencana aksi terperinci untuk memenuhi mandat minimal 40% belanja infrastruktur secara bertahap dan segera melakukan rasionalisasi belanja operasi yang tidak prioritas, alihkan ke sektor produktif dan pelayanan dasar. [v]



PDI PERJUANGAN

# Serius Perkuat Mandiri Fiskal

**K**enaikan pendapatan dan belanja harus dilihat bukan hanya dari sisi angka dan keseimbangan fiskal, tetapi terutama dari sejauh mana APBD mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.

Adanya rencana peningkatan PAD sebesar 1,48% dinilai masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan potensi ekonomi daerah. Khususnya pajak daerah yang hanya meningkat 1,33%, sementara itu, masih terdapat ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer.

Mencermati adanya peningkatan belanja modal sebesar 13,71% atau Rp 28,45 miliar. Kenaikan ini pada prinsipnya patut diapresiasi apabila benar-benar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Namun sebaiknya kenaikan belanja modal hanya berhenti pada pembangunan fisik dan serapan anggaran, melainkan yang jauh lebih penting adalah manfaat dan kualitas hasil pembangunannya.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap berbagai belanja

prioritas yang disampaikan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, UMKM, persampahan, hingga penanganan rumah tidak layak huni. Setiap program harus memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta penerima manfaat yang dapat diketahui masyarakat.

Terkait pembiayaan daerah yang mengalami penurunan sebesar 13,33% atau Rp.1 miliar, serta adanya peningkatan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD menjadi Rp3,5 miliar, disampaikan bahwa hal ini jangan sampai penyertaan modal ini hanya menjadi kewajiban APBD tanpa memberikan kontribusi yang sepadan kepada daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar dokumen angka yang selesai dibahas dan disahkan. Maka, adanya kenaikan pendapatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja. Selain itu, kenaikan belanja harus menghasilkan peningkatan pelayanan.[v]



# Perbaikan Basis Data

**K**enaikan PAD yang masih relatif terbatas perlu selalu menjadi perhatian. Kemandirian fiskal daerah harus terus diperkuat, bukan hanya dengan meningkatkan target, tetapi dengan memperbaiki basis data, proses digitalisasi pemungutan, menutup potensi kebocoran, mengoptimalkan aset daerah, dan memperkuat kinerja BUMD tanpa terus menambah beban masyarakat.

Berkenaan dengan struktur belanja daerah tahun anggaran 2027 disebutkan bahwa belanja daerah dirancang menjadi Rp2,81 triliun dan telah meningkat 2,23 persen. Begitu juga dengan belanja operasi meningkat 1,06 persen menjadi Rp2,16 triliun, sementara belanja modal meningkat 13,71 persen menjadi Rp235,98 miliar.

Atas perhitungan anggaran ini, mengapresiasi peningkatan belanja modal. Namun, peningkatan anggaran harus dipastikan menghasilkan output dan outcome yang terukur. Infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan penerangan jalan umum harus ditentukan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan wilayah, dan dampak langsung terhadap masyarakat.

Adapun atas rencana pendanaan

prioritas APBD 2027, Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap alokasi untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin, tambahan penghasilan guru, gaji pppk paruh waktu, insentif tenaga pendidikan, subsidi bunga UMKM, pelayanan BLUD, bantuan operasional satuan pendidikan, rumah tidak layak huni, pemeliharaan infrastruktur, rehabilitasi ruang kelas, sarana prasarana kesehatan, dan penanganan persampahan.

Program-program tersebut sejalan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat. Fraksi PKS menekankan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, tidak tumpang tindih, dan dapat diukur hasilnya.

Kemudian berkenaan penyertaan modal kepada BUMD, pemerintah daerah merencanakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,5 miliar. Fraksi PKS memandang penyertaan modal harus ditempatkan sebagai investasi publik yang memiliki target kinerja, manfaat ekonomi dan sosial, serta akuntabilitas yang jelas.

Setiap penyertaan modal harus didukung business plan, indikator kinerja, target dividen atau manfaat bagi daerah, dan mekanisme evaluasi yang terukur. [v]



# Dukung Penguatan UMKM

**F**raksi PKB menghormati prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sehingga disampaikan sikap apresiasi atas upaya Pemkab Sumedang dalam menyusun RAPBD 2027 yang dapat dimulai dengan berbagai tahapan berpegang pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, adanya penekanan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi, Fraksi PKB mendukung penuh terhadap kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas ekonomi agar capaian PAD akan meningkat drastis. Yaitu, program penguatan permodalan UMKM, peningkatan kualitas produksi dan jaringan pemasaran yang terintegrasi serta peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi.

Sedangkan, pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, Fraksi PKB menekankan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran daerah. Penggunaan anggaran harus transparan, akuntabel dan efisien.

Fraksi PKB mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran serta mendorong

perbaikan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta upaya lainnya yang bertujuan optimaalisasi peningkatan PAD untuk kemajuan Sumedang. Itulah sebabnya, Fraksi PKB memandang penting terobosan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber dana pembangunan yang lebih nyaman dan ramah.

Hasil kajian mengenai RAPBD 2027, terdapat tanggapan dan pertanyaan yaitu terkait implementasi UU No. 1 Tahun 2022 terutama tentang belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari APBD yang akan berlaku pada tahun 2027. Berdasarkan komposisi RAPBD 2027, belanja pegawai dikisaran 45%, sehingga terdapat ketidaksesuaian. Meski besaran rencana belanja modal pada RAPBD 2027 ini lebih besar alokasinya dari jumlah yang diatur peraturan perundang-undangan.

Adapun pertanyaan lainnya adalah terkait tema pembangunan produktivitas ekonomi untuk tahun 2027 yang dirasa kurang fokus dengan implementasi belanja program yang ada pada RAPBD 2027. Begitu juga dengan implementasi inovasi digital terhadap belanja daerah yang terdapat masih tingginya biaya administrasi umum dan administrasi keuangan serta jasa dalam RAPBD 2027.[v]



# Apresiasi untuk Rehab Kelas

Fraksi PAN menekankan kepastian status P P P K namun mengapresiasi pengalokasian gajinya yang telah dianggarkan sebesar Rp. 62,5 miliar yang memberi kepastian status kerja bagi tenaga honorer daerah.

Fraksi PAN menyambut baik alokasi besar untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah sebesar Rp25,2 miliar dan pengadaan sarana prasarana pendidikan sebesar Rp. 9 miliar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Hal ini diharapkan juga sejalan dengan upaya stimulus ekonomi rakyat yaitu mendukung penuh adanya subsidi bunga untuk UMKM sebesar Rp1,2 miliar sebagai roda penggerak ekonomi kerakyatan.

Belanja pembebasan tanah di Kawasan pusat pemerintahan, Fraksi PAN meminta penjelasan atas peruntukan dan lokasi dari pembebasan tanah yang direncanakan sebesar Rp.25 miliar.

Anggaran URC persampahan sebesar Rp 3,8 miliar, Fraksi PAN mempertanyakan apakah anggaran ini hanya habis untuk biaya angkut-buang ke TPA, atau sudah mencakup program pengurangan sampah dari hulu melalui pemberdayaan bank sampah.

Selanjutnya adalah terdapat saran dari

fraksi ini yaitu tentang digitalisasi retribusi daerah. Hal ini disampaikan mengingat pos retribusi daerah diproyeksikan tumbuh positif sebesar 5,56% atau Rp.123,35. Fraksi PAN menyarankan pemda menerapkan sistem e-retribution secara penuh untuk menutup celah kebocoran kas di lapangan.

Berkaitan dengan adanya catatan yang ditemukan sebagai anomali target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada lompatan asumsi target pendapatan dari deviden BUMD yang terlihat dipaksakan. Fraksi PAN mempertanyakan basis rasionalitas pemda dalam menetapkan target pendapatan dari dividen BUMD.

Di akhir tahun 2026, pemda tersebut hanya berani menargetkan pertumbuhan 1,06%, namun mengapa di tahun 2027 target tersebut tiba-tiba melompat menjadi 8,08%. Apakah lompatan target ini didasarkan pada kajian performa BUMD yang objektif melihat kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik baik saja atau sekadar angka hiasan di atas kertas agar postur pendapatan daerah terlihat surplus dan seimbang.[v]



# Bukan Sekadar Anggaran Terserap

**F**raksi PPP memandang bahwa RAPBD 2027 harus ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program yang nyata, terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dari sisi pendapatan, Raperda APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 2,813 triliun, meningkat 2,27 persen dibandingkan APBD 2026. Namun komposisinya masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer, yakni sekitar 74,37 persen, sementara kontribusi PAD sekitar 25,62 persen.

Peningkatan kemandirian fiskal tidak cukup hanya dengan menaikkan target pajak dan retribusi, tetapi harus dibarengi dengan perluasan basis ekonomi, digitalisasi pelayanan, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD serta penciptaan iklim investasi yang mampu menghasilkan sumber-sumber pendapatan baru.

Fraksi PPP mengapresiasi peningkatan belanja modal sebesar 13,71 persen menjadi Rp 235,98 miliar, termasuk peningkatan alokasi untuk jalan, jaringan dan irigasi. Infrastruktur merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang, irigasi mendukung produktivitas pertanian, dan infrastruktur

publik yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan APBD 2027 bukan sekadar bagaimana anggaran dapat terserap, tetapi bagaimana setiap rupiah anggaran menghasilkan output, outcome dan manfaat yang sepadan bagi masyarakat. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja juga telah menekankan keterkaitan antara pendanaan, keluaran, manfaat dan efisiensi.

Keberpihakan anggaran juga harus tercermin pada sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi tema utama tahun 2027 harus dipastikan sebagai pertumbuhan yang inklusif, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, pertanian, industri, pariwisata dan berbagai sektor produktif lainnya.

Pemerintah daerah menargetkan penurunan kemiskinan dan pengangguran sekaligus peningkatan IPM. Program unggulan untuk mengatasinya harus dipastikan berapa target kontribusinya dan bagaimana keberhasilannya akan diukur sampai akhir 2027.[v]



# Pertumbuhan PAD Terlalu Konservatif

**F**raksi Gerindra menilai pertumbuhan PAD terlalu konservatif. Adanya proyeksi kenaikan PAD sebesar 1,48% atau Rp10,49 miliar tergolong sangat rendah, bahkan berada di bawah estimasi laju inflasi tahunan. Kenaikan pajak daerah yang hanya sebesar 1,33% mengindikasikan kurang optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya lokal.

Sedangkan, adanya penurunan lain-lain PAD yang sah sebesar 0,68% atau Rp1,65 miliar memerlukan klarifikasi apakah terjadi penurunan potensi penerimaan, pengalihan instrumen pendapatan, atau penurunan penerimaan bunga kas daerah.

Belanja operasi menyedot porsi terbesar mencapai 76,87% atau Rp2,16 triliun dari total belanja. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang menyentuh masyarakat langsung. Namun, untuk penganggaran belanja modal hanya dianggarkan sebesar 8,39% atau Rp235,98 miliar dari total belanja. Angka ini masih tergolong minim untuk memenuhi kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Fraksi mempertanyakan mengapa

alokasi belanja modal masih berada di bawah 10% dari total APBD serta rencana strategis apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan porsi belanja modal pada tahun-tahun mendatang.

Untuk penganggaran Belanja Tidak Terduga yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 33,96% atau naik Rp2,71 miliar menjadi Rp10,71 miliar. Pengalokasian dana cadangan sebesar ini perlu dipastikan memiliki kerangka acuan dan acuan efisiensi yang ketat agar tidak menjadi dana cadangan tanpa target terukur. Selain itu, dipertanyakan juga mengenai pertimbangan dan perhitungan risiko mendesak apa yang melandasi peningkatan belanja tidak terduga.

Terhadap pembiayaan daerah, dalam analisa Fraksi Gerindra terdapat pengeluaran pembiayaan naik 40% yaitu dari Rp2,5 miliar menjadi Rp 3,5 miliar untuk penyertaan modal BUMD. Namun, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu dividen pada PAD hanya naik Rp1,22 miliar sehingga menjadi Rp16,34 miliar. Hal ini menunjukkan return on investment dari BUMD perlu dievaluasi ketat.[v]

## NOTA JAWABAN

# Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah

**B**upati Sumedang Dony Ahmad Munir menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda RAPBD 2027. Kondisi yang paling banyak disebut dalam pandangan umum fraksi adalah tingginya ketergantungan fiskal daerah Sumedang atas dana transfer dari pemerintah pusat.

Meski dalam kondisi ketergantungan, Pemkab sangat menyambut baik dan sependapat dengan rekomendasi untuk melakukan digitalisasi pendapatan asli daerah. Digitalisasi PAD sudah dilakukan meski bertahap baik dari segi jenis objek maupun wajib pajak dan retribusi. Pemkab menekankan upaya digitalisasi PAD ditujukan juga untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melakukan kewajibannya. Selain itu, digitalisasi pajak diperlukan karena basis data pendapatan belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan sehingga berisiko potensi tidak tergali sepenuhnya.

Upaya ini berjalan sinergis dengan pelaksanaan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan fiskal Sumedang serta mencapai target pembangunan sesuai RPJMD 2024-2029. PAD yang masih berada pada kisaran 25,62% dari total pendapatan menunjukkan ruang peningkatan kemandirian fiskal masih terbuka luas.

Dengan adanya penurunan pada pos lain-lain PAD yang sah sebesar 0,68%. Penurunan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena pada saat yang sama kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus berkembang. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing sumber pendapatan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penurunannya.

Pemda akan menerapkan strategi kebijakan untuk mengoptimalkan PAD, yaitu optimalisasi

pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran database, optimalisasi aset daerah, peningkatan kontribusi BUMD serta digitalisasi pemungutan. Pemetaan potensi pajak yang realistis dan optimal, juga harus disusun berdasarkan pemetaan potensi yang realistis, data historis, perkembangan ekonomi dan kondisi aktual di lapangan.

Adanya perubahan dampak UU Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah (HKPD) khususnya terkait pajak dan retribusi, yaitu telah dihapuskannya enam jenis retribusi serta penyesuaian tarif maka hal ini belum sepenuhnya tertutup oleh upaya pendapatan lain. Saat ini, pemda bukan sekedar mengganti pendapatan yang hilang dengan menaikkan tarif pada sumber lainnya.

Substitusi akan dilakukan melalui optimalisasi sumber PAD yang masih memiliki potensi, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset dan peningkatan kontribusi BUMD. BUMD dengan keberadaannya dapat diproyeksikan sebagai pemberi manfaat dan penyumbang pendapatan daerah. Itulah sebabnya, dilakukan penyertaan modal kepada BUMD terhadap peningkatan PAD dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi penyertaan modal kepada BUMD dipastikan harus memberikan manfaat yang jelas bagi daerah.

BUMD yang mendapat tambahan penyertaan modal adalah Bank Sumedang sebesar Rp.2,5 miliar dan Perumda Air Minum sebesar Rp.1 miliar berdasarkan evaluasi kinerja masing-masing BUMD. Pemkab akan lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dari BUMD sekaligus menjadi momentum perbaikan berbagai persoalan BUMD. [v]

**NOTA JAWABAN**

# Ini Strategi Naikan PAD

**R**APBD 2017 akan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perangkat daerah pengelola pendapatan dengan pemutakhiran data objek dan subjek pajak, pengawasan transaksi, penagihan piutang, digitalisasi serta pemetaan potensi baru.

Terdapat komponen spesifik lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan sebesar Rp1,65 miliar adalah hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, menurun sebesar Rp. 86 juta, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan diproyeksikan menurun sebesar Rp. 126 juta, dan pendapatan BLUD menurun sebesar Rp1,44 miliar. Penurunan target pendapatan dimaksud didasarkan pada capaian realisasi tahun sebelumnya.

Upaya tata kelola pendapatan, pemerintah daerah tidak hanya menetapkan target nominal, tetapi juga memperhatikan indikator proses pendapatan daerah. Pemkab akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan berbagai cara. Kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment masih rendah dan penegakan sanksi terhadap penunggak belum optimal.

Adapun strategi yang akan dilakukan meliputi pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan berbasis risiko, rekonsiliasi data transaksi, penagihan terhadap piutang, pemberian informasi kewajiban perpajakan, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Berkaitan dengan berbagai program dan pendanaan yang akan dialokasikan, salah satunya adalah terdapat rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.4,6 miliar, terdiri dari

sebesar Rp,1 miliar dialokasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten serta sebesar Rp.3,6 miliar dialokasikan melalui skema bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Adapun penentuan Calon Penerima Calon Lokasi (CPSL) berdasarkan data yang sudah masuk melalui aplikasi tataloka yang sudah terintegrasi dengan e-office desa. Sedangkan yang dialokasikan melalui skema bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan memperhatikan usulan proposal yang telah terekam dalam sistem informasi pemerintah daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan.

Alokasi untuk pembebasan lahan peruntukan kawasan perkantoran Pemkab. Pengalokasian ini didasarkan pada komitmen penyelesaian pembebasan tanah sebagaimana surat yang disampaikan kepada kepala ombudsman Provinsi Jawa Barat. Dari komitmen tersebut, diantaranya terdapat anggaran sebesar Rp.25 miliar dialokasikan untuk pembebasan tanah seluas sekitar 2,5 hektara.

Anggaran persampahan sebesar Rp3,8 miliar dialokasikan untuk biaya operasional kendaraan persampahan, penggantian suku cadang serta biaya operasional satgas kebersihan.

Beban iuran jaminan kesehatan masyarakat miskin sepenuhnya ditanggung daerah. Hal tersebut merupakan dampak dari dicabutnya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 41 Tahun 2021 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga sejak tahun 2025 seluruh iuran jaminan kesehatan masyarakat miskin sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.[v]

## NOTA JAWABAN

# Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 4,29-6,34%, maka arah kebijakan tahun 2027 difokuskan pada produktivitas sektor primer, industri pengolahan, UMK naik kelas, pariwisata, serta pendukung bagi investasi, logistik, SDM dan digital. Pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seluruh program unggulan yang menjadi pengungkit utama penurunan kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan UMK, hilirisasi, pariwisata, pembangunan layanan dasar, kesehatan, pendidikan, serta keterampilan tenaga kerja diukur berdasarkan kinerja pencapaian target makro RKPD 2027 dan indikator program, termasuk produktivitas, perluasan kerja, kualitas layanan, dan peningkatan pendapatan kelompok sasaran.

Peningkatan belanja modal sebesar 13,71 persen. Alokasi ini didasarkan pada skala prioritas, kebutuhan masyarakat dan dampak ekonominya. Seluruh belanja pada RAPBD 2027 termasuk belanja modal telah berdasarkan prioritas kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.

Sampai saat ini, alokasi belanja modal masih dibawah 10% dan akan terus ditingkatkan melalui rencana strategis pemerintah daerah. Peningkatan porsi ini bukan hanya sekedar menaikkan angka melainkan sejauh mana anggaran ini dapat

bermanfaat dan berefek ganda ke tengah masyarakat.

Selain itu, menetapkan besaran belanja modal dalam APBD diperlupakn upaya besar karena haarus untuk menggeser belanja yang bersifat rutin/konsumtif untuk menciptakan atau meningkatkan aset dan kapasitas pelayanan publik. Tidak terkecuali dalam upaya dan tantangan pemenuhan belanja mandatory minimal sebesar 40% belanja infrastruktur pelayanan publik, maka pemkab akan melakukan pemenuhan belanja dengan langkah-langkah strategis untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Berkenaan dengan prosentase belanja pegawai sebesar 45% Dijelaskan bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, formulasi perhitungan belanja pegawai setelah dikurangi belanja tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru sehingga prosentase belanja pegawai menjadi sebesar 34,21%. Maka, perhitungan ini membuaat belanja pegawai membengkak anggarannya.

Seluruh alokasi belanja telah disesuaikan dengan dengan tema pembangunan produktivitas ekonomi untuk tahun 2027, yang telah diiterjemahkan melalui lima kelompok kebijakan yaitu produktivitas sektor primer, industri pengolahan, UMK naik kelas, dan pariwisata berbasis budaya serta pendukung produktivitas seperti investasi, logistik, SDM, serta digitalisasi. [v]

PALANG MERAH  
INDONESIA

SETIAP  
PERTOLONGAN  
BERARTI



PEDULI  
BERGERAK  
BERSAMA

H A R I

# PALANG MERAH INDONESIA

3 SEPTEMBER 2026

Bersama masyarakat,  
kita wujudkan kemanusiaan  
yang lebih kuat.



SELAMAT  
MEMPERINGATI

24 SEPTEMBER 2026



# HARI TANI NASIONAL

24 SEPTEMBER 2026

*Petani Kuat  
Indonesia Hebat*

Dengan semangat dan kerja keras  
petani, kita wujudkan ketahanan  
pangan untuk masa depan  
Indonesia yang lebih baik.

